

# LAMPIRAN

## 1. Surat Kabar Harian Republika



Jakarta, 21 Maret 2017. Komisi (G/8) malam ini. Karena teman bakal caleg itu ada di Kota Kupang, KPU Provinsi NTT bisa mengambil alih hal itu. Sebab, kata dia, jika putusan pengadilan atas kasus kekerasan seksual terhadap anak sudah berstatus hukum tetap atau inkrah, yang bersangkutan sudah harus dicoret sebagai bakal

ujar Tanti. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTT Jefri Riwo Kore menegaskan, pengusutan HK sudah sesuai konsultasi dengan Pengadilan Negeri Kota Kupang. Demokrat berpedoman pada putusan PN Kota Kupang yang memutuskan HK bersalah terhadap kasus pemerkosaan umum, bulan pe-

Sebelumnya, KPU pusat mengaku ada satu bakal caleg yang diduga merupakan mantan terpidana kasus kejahatan seksual terhadap anak. Kasus ini juga dilahaskan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sebagaimana diketahui, dalam PKPU No 20 tahun 2018, mantan pelaku kejahatan seksual kepada anak dilah-

menyewali isu ini dalam pemilu serta membantu KPU mengatasi anggotanya terkait kejahatan seksual anak yang muncul. "Saya kira KPAI perlu membantu KPU untuk kepentingan ini karena saya kira KPU mempunyai keterbatasan untuk menjangkau seluruh caleg," kata dia.

# PKS Berencana Laporkan Andi Arief

● ALI MANSUR, DIAN ERIKA NUGRAHENY

JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah tuduhan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut PKS menerima uang dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno terkait pencalonan wakil presiden. Selain menuding PKS, Andi Arief juga menyebut Partai Amanat Nasional (PAN) ikut menerima mahar politik uang sebesar Rp 500 miliar dari Sandiaga Uno.

Ketua DPP Bidang Hubungan Masyarakat PKS Ledia Hanifa menilai tuduhan Andi Arief sangat serius. Sebab, tuduhan tersebut terkait dengan fitnah menerima mahar politik dalam proses pencalonan wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. PKS menilai tuduhan Andi Arief sudah masuk tindakan pidana dalam pemilu. "Pernyataan Andi Arief jelas fitnah keji. Ini tuduhan tidak main-main yang memiliki konsekuensi hukum terhadap yang

bersangkutan," kata dia, Kamis (9/3). PKS berencana melaporkan cutitan Andi Arief soal tuduhan mahar politik ini. Ledia menyebut, sebenarnya Andi Arief sebagai petinggi partai politik tidak seyakinya sembarangan melempar fitnah kepada institusi secara terbuka. "Saya melihat tidak ada klarifikasi resmi dari pernyataan sehingga kami menyimpulkan ini juga merupakan sikap institusi partai tempat Andi Arief bermaung," kata dia menegaskan.

Demokrat berkilah dan menyatakan cutitan Andi Arief sebagai pengungkapan emosi ketidakpuasan kardus atas isu pencalonan Sandiaga Uno sebagai cawapres. Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan enggan mengomentari soal tuduhan adanya mahar politik yang dilayangkan kepadanya kepada PKS dan PAN. Syarif hanya menyatakan cutitan soal istilah "jendral kardus" yang ditulis kadernya sebagai bentuk ketidakpuasan.

"Yang penting apa yang disampaikan oleh Andi Arief (soal jenderal

kardus) itu merupakan manifestasi daripada ketidakpuasan," ujar Syarif.

**Diminta melapor**  
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Andi Arief melaporkan tuduhan adanya mahar politik yang disampaikan. Anggota Bawaslu, Fritz Edward Sitangkir, mengatakan, jika Andi Arief bersedia melaporkan tuduhan tersebut disertai bukti, Bawaslu siap melakukan penelusuran.

"Apabila ada para pihak yang mengetahui, kami sangat mengharapkan kehadirannya untuk datang di Bawaslu. Sehingga, saat Bawaslu melakukan sebuah klarifikasi, kami mendapatkan suatu informasi secara komprehensif," tutur Fritz.

Dia melanjutkan, Pasal 328 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan larangan bakal calon (presiden maupun wakil presiden) membuat uang atau imbalan kepada parpol agar dapat menjadi capres atau cawapres. Jika nantinya ada putusan hukum yang berkekuatan tetap mem-

buktikan bahwa seseorang menyerahkan imbalan kepada parpol untuk menjadi capres atau cawapres, pencalonannya dapat dibatalkan.

Selain itu, parpol yang menerima mahar politik untuk pencalonan presiden atau wakil presiden tidak dapat mencalonkan lagi untuk pemilu berikutnya. Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin, menegaskan, penelusuran terhadap dugaan adanya mahar politik hanya bisa dilakukan setelah ada pihak yang melaporkan kasus tersebut.

"Kami tidak memiliki wewenang melakukan pemanggilan terkait dugaan mahar politik. Kami juga tidak punya wewenang untuk melakukan penyadapan (terkait hal tersebut), kecuali ada pihak yang melaporkannya. Jika demikian, kami baru bisa lakukan," ujar Afif. Sebelumnya, dalam akun Twitter-nya, Andi Arief menyebut Sandiaga telah membantu PKS dan PAN agar menjadi cawapres Prabowo. ■ ed agas rahardj



# Tong Status Nasional

...siala kekinian bersama." ujar Zed, ma Komisi III DPRD NTB Johan se mengungkap, bencana gempa ek dengan dampak yang sangat berat siala tidak akan bisa diselesaikan Pen- yti. Menuntut dia, sebagai dampak dan pnyatan, semoga gempa Lombok sebagai siala wicara dunia serta memunculkan B yang luar biasa. Tidak hanya relawan siala juga dari relawan internasional siala hal tersebut, status gempa Lombok siala ditaklukkan statusnya menjadi siala nasional", ujar Johan, kemarin. Ia siala, karena masih berlatar bencana siala, beberapa relawan luar negeri sudah siala persiapan aparat dan akan siala. siala, dan mengatakan, setelah ditetapkan siala bencana nasional, Presiden segera siala kebijakannya dengan instruksi pny- siala panyanaan pas-pempra. Kemudian siala dengan rumah rakyat, Gedung serasa, siala program lain dalam bentuk siala program APN. Ini karena kemampuan siala Pempro NTB tidak akan mampu siala pemangatan pas-pempra Lombok siala bencana nasional juga akan men- siala portparasi lembaga-lembaga in- siala didap negara salaku yang penuh siala dampak gempa ini." katanya.

Namun, ada pendataan lapangan yang siala doer dan oleh Koranil, Babinsa, dan B- siala polka. Itu telah bertepatan yang men- siala gal, yang langsung dilakukur, tidak sempat siala panyanaan. Itu sumbuha lebih besar. Hasil dari pendataan yang terakhir di- siala ma, ada sebanyak 350 korban jiwa. Agar tidak siala terjadi leumpang-pasuruan di sini lagi, Winono siala meminta untuk pihak yang menulata untuk siala melakukan vertikal dan terakal dalam secara siala bersana-sana sehubungan dituntut lain. Selain dari BNPT dan TNI, data jumlah siala korban meninggal dunia di NTB juga di- siala palikan Badan Nasional Pencarian dan siala Pertolongan (BNNP), Jember, Jember, siala yang ada orang. Sedangkan menurut lapo- siala Lombok Utara, korban meninggal dunia siala sebanyak 147 orang, di Lombok Utara siala berwisata pertamata para calon siala pany- siala. Data yang meninggal dunia adalah data siala yang sensitif dan banyak di mana di mana siala dan masyarakat. Lantak mana yang benar- siala mana benar karena berdasarkan data dari siala lapangan", kata Kepala Pusat Data Informasi siala dan Humas BNPT, Adiguna Pratiwi Nya- siala. Ia menyebut dalam masa tanggap darurat siala, pendataan data korban adalah hal yang biasa siala. Hal tersebut juga terjadi saat gempa bumi di siala Sumatera Barat pada 2009 dan gempa Gunung siala Merapi pada 2010.

# Kiai Ma'ruf Prioritaskan Ekonomi Umat

● MAJLIS, (MEDI) JAKARTA - Bakal calon re- pil presiden pendamping Joko Widodo, KH Ma'ruf Amin, mem- pnyatakan lima hal untuk peri- ode 2019-2024. Kelima prioritas itu diungkapkan Kiai Ma'ruf saat berkesempatan ke gedung PBNU, Jakarta, kemarin.

"Mudah-mudahan kami bisa di- pilih dan bisa membangun negara lebih kuat," ujarnya.

Menurut Kiai Ma'ruf, aspek pertama adalah menjaga ke- utuhan bangsa. Sebab, kalau bangsa tidak beraturan, penan- taan tidak mungkin dilak- ukkan. Poin kedua adalah men- jaga penormalan antara sesama umat falam dan sesama warga bangsa.

"Apok ketiga, lanjut Kiai Ma'ruf, terkait ekonomi. Ekonomi yang beradik dibangun adalah ekonomi keamatan. Menarat dia, utama ini pembangunan ekonomi di Indonesia harus di- mulai dari bawah. "Sedangkan diumumkan area baru ekonomi umat. Sementara, selama ini yang terdapat adalah area ekono- mi para konglomerat yang tidak pernah meretes kepada umat," kata Kiai Ma'ruf.

Kemudian poin keempat dan kelima adalah karakter bangsa dan panyanaan bakam.

Sebelum Kiai Ma'ruf memb- yak untuk bakal mendampingi Jokowi dalam pilpres menda- yang adalah mantan ketua Ma- jlis Konsultasi Ma'bud MMD Ma'bud sempat menyumbang siala sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (5). Lokasi restoran tersebut te- pat berada di seberang Restoran Ekstera. Menong, tertera Ja- wi bertema dengan mitra koalisi. Berikutan informasi yang didapat Republika, Ma'bud lu- rang lebih satu jam berada di restoran tersebut sejak pukul 16.00 WIB. Ia terapan meng- makan kemisa putih dari Kiai Jokowi ditemani oleh sejumlah politikus.

dalam Kealisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi sebagai calon wakil presiden adalah Profesor Kiki Hagi Mar'uf Amin, "ujar Jokowi di Kantoran Pitaran, Menteng, kemarin.

Kemudian dia, pendaharan pasangan itu ke Komisi Pany- ilahan Umum (KPU) akan dilak- ukkan pada Jumat (10/8) pukul 09.00 WIB. Jokowi dan Kiai Ma'ruf akan berespondi di Gedung Joang 43 menuju KPU. Mereka juga akan didampingi para ketam perapi koalisi.

Menanggapi keripatanma Jo- kowi, Ma'bud mengaku lega- wa. "Saya katakan saya maklum se- mampunya saya jadi Pak Jokowi mungkin saya akan melakukan hal yang sama karena kon eku- sinya ini politik. Permainan poli- tik dan di dalam permainan poli- tik, apalagi sesama bisa terjadi," ujarnya di MMD Institute, Ma- ranan, Jakarta, Kamis (9/8).

Ia memba Jokowi dihalap- kan situasi di mana harus membuat keripatan yang baik. Sehingga jika tidak ada kepa- tusan akan berkolaborasi Jokowi. Menurut dia, kepada Jokowi, Ma'bud mengatakan siala sangat karena berubah di de- rik- dik sebelum berespondi. Sebab, hingga meng, belum ada perubahan dari informasi yang diterima.

Namun, sekali lagi, Ma'bud menolak tidak mempermenah- hal tersebut kepada Jokowi. "Saya sampaikan ke Pak Jokowi, saya tidak kerena terangi me- nany kanyet. Tetapi sekarang sudah ada informasi yang saya katakan Pak Jokowi engok untuk meresa berubah siala apa, saya bilang program saya, yang siala apa tidak apa," ujar Ma- bud.

Ia juga tidak menabuh- tabuh berespondi dalam undangan, dihalari Jokowi, sebelum akhirnya berespondi setelah Jokowi berespondi partai koalisi. "Ya karena sampai sore gitu berespondi masih simpang- siur, berarti tidak ada ada sesuatu yang diharapkan ya pulanya," kata Ma'bud.

Papari, Kiai di hari Koalisi Indonesia Kerja, Ma'bud meng- ungkakan bahwa dia akan ber- siala dengan Jokowi dan Ma'bud sebagai calon wakil presiden. "Saya akan berespondi dengan Jokowi dan Ma'bud sebagai calon wakil presiden," ujarnya.

# REPUBLIKA

## DOMPET GEMPA LOMBOK

**PENDAFARAN BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**PENDAFARAN CALON PRESIDEN (JKP)** Persepsi capres-cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang telah diumumkan secara resmi pada hari Rabu (7/8) kemarin. Pendaftaran ini berlangsung di Gedung Sate, Jakarta, pada hari Rabu (7/8) kemarin.

**PENDAFARAN BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**PENDAFARAN CALON PRESIDEN PASANGAN** Pasangan calon-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang telah diumumkan secara resmi pada hari Rabu (7/8) kemarin. Pendaftaran ini berlangsung di Gedung Sate, Jakarta, pada hari Rabu (7/8) kemarin.

# Jokowi dan Prabowo Ingin Pemilu Damai

**Taluk berkitus adalah pemerkasan kesehatan capres dan cawapres**

Jokowi dan Prabowo ingin pemilu damai. Mereka ingin pemilu damai dan jujur. Mereka ingin pemilu damai dan jujur. Mereka ingin pemilu damai dan jujur.

**PRABOWO**

**JOKOWI**

# 7 HARI Menuju Pemilu

## Presiden Siapkan Perpres Bantuan Gempa Lombok

**PRABOWO**

**JOKOWI**

**PRABOWO**

**JOKOWI**

pada veteran karena komitmen lingkungan dengan yang lebih di dukung para veteran. Selain karena itu, banyak juga yang mengemukakan pendapat bahwa program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) M. Hidayat mengatakan, "Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan." Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) M. Hidayat mengatakan, "Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan."

Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) M. Hidayat mengatakan, "Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan." Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) M. Hidayat mengatakan, "Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan."

Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) M. Hidayat mengatakan, "Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan." Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) M. Hidayat mengatakan, "Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan."

Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) M. Hidayat mengatakan, "Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan." Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) M. Hidayat mengatakan, "Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan."

Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) M. Hidayat mengatakan, "Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan." Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) M. Hidayat mengatakan, "Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan."

Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) M. Hidayat mengatakan, "Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan." Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) M. Hidayat mengatakan, "Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan."

## Studium Semi Ulama dan Politik Indonesia

di oleh M. Hidayat



Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) M. Hidayat mengatakan, "Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan." Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) M. Hidayat mengatakan, "Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan."

Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) M. Hidayat mengatakan, "Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan." Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) M. Hidayat mengatakan, "Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan."

Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) M. Hidayat mengatakan, "Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan." Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) M. Hidayat mengatakan, "Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan."

Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) M. Hidayat mengatakan, "Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan." Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) M. Hidayat mengatakan, "Program ini akan membantu para veteran dengan masalah kesehatan."

## Kejutan Last Minute

di oleh Rio Christawan

Jauh hari sebelum deklarasi dan pendaftaran capres-cawapres sudah diketahui oleh khalayak ramai bahwa akan ada remyah antara pejuang Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam kontes Pilpres 2019. Bahkan, ornamen partai pengusung juga telah jelas dengan mengauk pada Pasal 222 UU Pemilu terkait presidential threshold.

Apalagi yang diumumkan publik dan sudah terjawab adalah deklarasi capres-cawapres oleh masing-masing poros koalisi pada Kamis (9 Agustus) malam adalah figur calon wakil presiden (cawapres). Pasalnya, figur wakil presiden ini dipercaya dapat menjadi *game changer* dalam remyah Jokowi-Prabowo dalam kontes Pilpres 2019. Pentingnya cawapres sebagai *game changer* adalah mengungkap dalam remyah ini masing-masing poros koalisi telah mekar kekuatan dan kekuatan ini capres masing-masing koalisi berdasarkan rekam jejak koalisi *head to head* pilpres 2014 yang lalu.

Dilain pihak, dinamika nana Sandiaga Uno oleh poros Prabowo Subianto tentu dengan perubahan yang masam. Dengan lapangan poros ini akan mengadapi masalah yang signifikan sebagai pejuang, hal penting lainnya adalah mengungkap koalisi. Sebagaimana diketahui poros koalisi Gerindra menggaji masalah koalisi dalam minggu terakhir menjelang deklarasi cawapres.

Tawar-menawar antara PAN dan PKS pada minggu terakhir justru semakin meningkat dengan memertama Demokrat ke koalisi Gerindra. Artinya adalah siapa yang konduksi Gerindra kehilangan (ke) kepercayaan (mengingat nama Gerindra tidak mencakupi *presidential threshold*) jika kemuliaan dalam dinamika ini justru Demokrat. PAN dan PKS total gabungan ketiganya melahui *presidential threshold* justru menunjukkan minat poros koalisi yang akan menaruh opsi cawapres yang dapat diterima PAN dan PKS.

## Proyeksi Ekonomi Usai Pilpres

di oleh Ronny Sasmita

menunjukkan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, menjadi lima persen atau lebih, setelah bertumbuh lebih di atasnya pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, menjadi lima persen atau lebih, setelah bertumbuh lebih di atasnya pada tahun-tahun sebelumnya.

menunjukkan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, menjadi lima persen atau lebih, setelah bertumbuh lebih di atasnya pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, menjadi lima persen atau lebih, setelah bertumbuh lebih di atasnya pada tahun-tahun sebelumnya.

menunjukkan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, menjadi lima persen atau lebih, setelah bertumbuh lebih di atasnya pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, menjadi lima persen atau lebih, setelah bertumbuh lebih di atasnya pada tahun-tahun sebelumnya.

menunjukkan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, menjadi lima persen atau lebih, setelah bertumbuh lebih di atasnya pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, menjadi lima persen atau lebih, setelah bertumbuh lebih di atasnya pada tahun-tahun sebelumnya.

## Proyeksi Ekonomi Usai Pilpres

di oleh Ronny Sasmita

menunjukkan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, menjadi lima persen atau lebih, setelah bertumbuh lebih di atasnya pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, menjadi lima persen atau lebih, setelah bertumbuh lebih di atasnya pada tahun-tahun sebelumnya.

menunjukkan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, menjadi lima persen atau lebih, setelah bertumbuh lebih di atasnya pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, menjadi lima persen atau lebih, setelah bertumbuh lebih di atasnya pada tahun-tahun sebelumnya.

menunjukkan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, menjadi lima persen atau lebih, setelah bertumbuh lebih di atasnya pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, menjadi lima persen atau lebih, setelah bertumbuh lebih di atasnya pada tahun-tahun sebelumnya.

menunjukkan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, menjadi lima persen atau lebih, setelah bertumbuh lebih di atasnya pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, menjadi lima persen atau lebih, setelah bertumbuh lebih di atasnya pada tahun-tahun sebelumnya.

# Bawaslu Diminta Menelusuri

● DINA FIRMAN, GRADIAN

MANAJEMEN. Direktur Perekonomian dan Industri, Perdagangan dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Korbid) Perekonomian, Agus Purnomo, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menelusuri praktik politik uang yang dilakukan oleh calon legislatif (Calong) dan partai politik dalam rangka pemilihan umum legislatif (PILU) 2019.

# PAN Ikut Meradang



Perwakilan PAN di DPRD Kabupaten Pangajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, dan DPRD Kabupaten Pangajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, saat menghadiri rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pangajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, di Pangajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, pada Rabu (8/8/2018).

Perwakilan PAN di DPRD Kabupaten Pangajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, dan DPRD Kabupaten Pangajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, saat menghadiri rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pangajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, di Pangajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, pada Rabu (8/8/2018).

# Aher Mengurdirkan Diri dari Bacaleg

● ANITA LINDA, ANTARA

MANAJEMEN. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pangajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, Agus Purnomo, mengumumkan akan mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota legislatif (Calong) dalam rangka pemilihan umum legislatif (PILU) 2019.

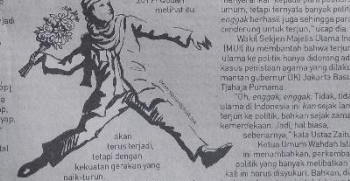
# Alasannya untuk Partisipasi

MANAJEMEN. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pangajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, Agus Purnomo, mengumumkan akan mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota legislatif (Calong) dalam rangka pemilihan umum legislatif (PILU) 2019.

# 'Ulama Terjun karena Para Politisi Gagal Menyejahterakan'

● STEVE MARACONA

MANAJEMEN. Ulama Indonesia turun ke jalan untuk mengkritik pemerintah karena dinilai gagal menyejahterakan rakyat. Mereka melakukan aksi dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila.



Salah satu ulama yang turun ke jalan untuk mengkritik pemerintah karena dinilai gagal menyejahterakan rakyat.

MANAJEMEN. Ulama Indonesia turun ke jalan untuk mengkritik pemerintah karena dinilai gagal menyejahterakan rakyat. Mereka melakukan aksi dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila.

# Terjun langsung

● STEVE MARACONA

MANAJEMEN. Ulama Indonesia turun ke jalan untuk mengkritik pemerintah karena dinilai gagal menyejahterakan rakyat. Mereka melakukan aksi dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila.

# Terjun langsung

● STEVE MARACONA

MANAJEMEN. Ulama Indonesia turun ke jalan untuk mengkritik pemerintah karena dinilai gagal menyejahterakan rakyat. Mereka melakukan aksi dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila.

# Terjun langsung

● STEVE MARACONA

MANAJEMEN. Ulama Indonesia turun ke jalan untuk mengkritik pemerintah karena dinilai gagal menyejahterakan rakyat. Mereka melakukan aksi dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila.

# Terjun langsung

● STEVE MARACONA

MANAJEMEN. Ulama Indonesia turun ke jalan untuk mengkritik pemerintah karena dinilai gagal menyejahterakan rakyat. Mereka melakukan aksi dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila.

# Terjun langsung

● STEVE MARACONA

MANAJEMEN. Ulama Indonesia turun ke jalan untuk mengkritik pemerintah karena dinilai gagal menyejahterakan rakyat. Mereka melakukan aksi dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila.

# Relawan Jokowi Laporkan Sandiaga Uno

● DIAN ERIKA NUGRAHENY

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Rumah Relawan Nusantara Jokowi-Ma'ruf Amin, Fahmy Hekim, melaporkan dugaan mahar politik yang dilakukan bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno ke Rawasari, Fahmy menuntun. Sandiaga Uno diduga melanggar pasal 228 dan pasal 327 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang melarang partai menerima imbalan dalam

pelecatan presiden dan wakil presiden. "Kami melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan bakal calon wakil presiden (calonpres) koalisi Gerindra di mana kami juga melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017," tutur Fahmy di kantor Rawasari, Jakarta Pusat, Selasa (14/8). Fahmy mengklaim membawa sejumlah bukti untuk mendukung laporan ini. Bukti pertama adalah pernyataan Wakil

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief dalam akun Twitter-nya beberapa waktu lalu. Bukti kedua, pernyataan Andi Arief yang menyebut bahwa ada mahar politik masing-masing sebesar Rp 500 miliar sebagai dana kampanye untuk PAN dan PKS. Sedangkan dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 sudah diatur bahwa batas maksimal sambutan yang dapat kampanye dari persawangan untuk partai maksimal sebesar Rp

2,5 miliar," kata Fahmy. Selain itu, pasal 228 menyebutkan larangan menerima imbalan dalam pelecatan presiden dan wakil presiden. Meskipun telah menyampaikan laporan, Fahmy masih diminta Baswasu untuk melengkapi berkas isyaratnya.

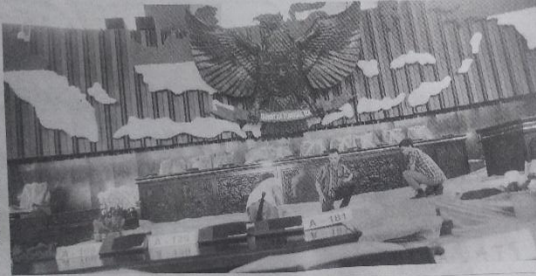
Selain dilaporkan Rumah Relawan Nusantara Jokowi-Ma'ruf Amin, Sandiaga juga dilaporkan Sekretaris Jenderal Federasi Indonesia Bersatu Me-

hammad Zakir Rasyidin. Pelapor menyatakan dirinya beserta tim mendiskusikan informasi awal dari Wakil Ketua Demokrasi Andi Arief. "Beritanya Federasi Indonesia Bersatu merindakajadi apa yang disampaikan oleh Pak Andi Arief. Sebab, para diduga ada mahar politik dari salah satu bakal calonpres yang saat ini masih," ujar Zakir. Menurut dia, pernyataan Andi Arief sangat perlu ditelusuri. Sebab, Andi berka-

kali sudah menyatakan mendapatkan informasi soal mahar politik dari pihak pihak yang bisa dipercaya. Baswasu memantapkan akan segera menindaklanjuti dan laporan terkait dugaan mahar politik ini. Anggota Baswasu, Prita Ekbaw Srigagar, menyatakan akan memanggil sejumlah pihak terkait pelanggaran ini. "Kami nanti akan memanggil sejumlah pihak yang dianggap mengetahui," ujar Prita. ■ [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)

### PERSIAPAN

Pekerja memajang pernak-pernik merah di ruang rapat partainya Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/8). Persiapan terus dilakukan untuk Sirang Tahunan MPR dan Pildes Kabupaten Presiden pada 16 Agustus mendatang.



# Asman Jadi Korban Koalisi

● DEBBE SUTIRNO FALZAH MUKSI

Wapres menilai

Hasan terkait perantaraan ini. Dari pertemuan Jokowi-Zakidhi ini akan ada pembicaran terkait jatah menteri jika PAN tidak ikut dalam koalisi pemerintah.

Namun, ia belum mengetahui kapan Presiden Jokowi akan mengumumkan pengantaraan menteri. Kalaupun pengantaraan menteri akan dilakukan, Asman cukup baik. "Bagus, dia akan jauh (berbeda) de-

kori," ujar Viva. Wakil Ketua Komisi IV DPR itu juga menambahkan jika perubahan Asman dari posisi menteri karena di-

namai secara tektis biar Pak Asman

# Gerindra-PKS Segera Bahas Pengganti Sandi

● MADIRUOH

JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra segera duduk bersama membahas pengganti Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purmono menuturkan bahwa dalam waktu dekat, kedua pimpinan partai akan bertemu membahas pengganti Sandi.

"Kami akan dibahas bersama antara pimpinan PKS dengan pimpinan Gerindra," ujarnya kepada Republik, Selasa (14/8). Namun, mengenai kapan pertemuan tersebut digelar, Syakir masih menaruh sikapnya. Yang pasti, kata dia, saat ini para kader PKS sudah disiapkan untuk menggantikan posisi Sandi. Syakir mengatakan bahwa dalam waktu dekat, PKS juga akan mengemukakan keberyanya yang dipevokasikan untuk menduduki posisi wakil gubernur DKI Jakarta. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera ada keputusan nama yang akan di ajukan (sebagai wakil DKI)," kata Syakir.

Wakil Ketua DPRD DKI Indonesia Eriket PKS Trivissana membeberatkan ada tiga kriteria sosok yang layak untuk calon pengganti Sandiaga Uno. Salah satunya adalah bisa bekerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Tidak boleh ada masalah komunikasi. Dia harusnya tetap bisa Gubernur. Tapi pak wabup ini bisa bekerja sama, bisa membantu. Bisa mengkalapa," ujar Eriket yang akrab disebut Sandi di Republik, Selasa (14/8). ■ [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)

## 2. Surat Kabar Harian Jawa Pos

**Jawa Pos**  
12 AGUSTUS 2018  
Rp 8.000

### MAH FUD dan AHY Layak Ketua Tim Sukses

Koalisi Jokowi dan Prabowo Susun Strategi Kampanye

**AKHIR PENANTIAN**

**Hoax Marak, Gagal Bangun Komunikasi Politik Sehat**

**PERAN PENTING TIGA PILAR SENIOR**

**Jalan Mereka Masih Panjang**

**ATURAN KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL**

**6**

**Jawa Pos** 4 Hari Minggu 14 Agustus 2018 SELASA 14 AGUSTUS 2018 SELALU ADA YANG BARU! ETERAN RP 6.000

**BRUTAL** Polisi menhadirkan pelaku pemerkosaan dan pembakaran rumah yang menewaskan satu keluarga di Kecamatan Makasar (foto kiri). Kabarkoran rumah Saseti Senon dua hari (B.36).

**Nyawa Satu Keluarga Seharga 9 Saset Sabu-Sabu**  
Bandar Narkoba Otaki Pembakaran Rumah

si maragadana, erans erang dari saat kakuapa pusi teras. kakuapa kakuapa ulang anti-India kerdial Rp 10 juta. Dengan cara yang sangat kaji pusa rumah tempat mereka sanggup dibayar a.

**MAKASAR** - Kake jamwa itu dambuat dari tempat dar' l'abial. Laga Makasar. Kaa pntukil Akka.

**UTANG BERJUNG KEKEJIAN**  
Kasus peng...  
Kasus peng...  
Kasus peng...  
Kasus peng...

**SPORTAINMENT**  
**TANDA-TANDA SUPREMASI BARCELONA**  
Halaman 10-11

**Janji Transparan Dana Kampanye**  
Pastikan SBY Bukan Ketua Tim Sukses  
JAKARTA - Pasangan Presiden Subianto-Sandiaga Uno inges m...  
KAMARIS - Para p...  
KAMARIS - Para p...  
KAMARIS - Para p...  
KAMARIS - Para p...

**Prabowo Akui Takut Jarum Suntik**  
SORE - Para p...  
SORE - Para p...  
SORE - Para p...  
SORE - Para p...

**FLUKTUASI** **Depresiasi Lira Turki Serot Bunyah**

**Jawa Pos** 8 Hari Minggu 15 Agustus 2018 SELALU ADA YANG BARU! ETERAN RP 6.000

**1-0**  
INDONESIA MALAYSIA  
**SELANGKAH LAGI MENUJU GELAR**

**Pengumuman Cawapres Penuh Drama**

**Mengulang Pilpres 2014, Demokrat Jomblo Lagi**  
KEMENTERIAN...  
KEMENTERIAN...  
KEMENTERIAN...  
KEMENTERIAN...

**Kepentingan Parpol dan Kebutuhan Logistik**

# Mengulang Pilpres 2014, Demokrat Jomblo Lagi




JAKARTA - Jika Joko Widodo adalah pemenang politik capres dan cawapres 2014, maka pejuang demokrasi di Jember dan sekitarnya, Soediro, pendiri dan ketua organisasi Gerakan Pemuda (GP) Ansharud Daulat (GPAD) dan Ketua DPRD Kabupaten Jember, Prubowo Subianto, mengulang kembali perjuangan mereka pada pilpres 2014. Prubowo dan Soediro akan kembali mengajukan pasangan prabowo ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

**Keputusan Parpol dan Kebutuhan Logistik**

oleh LELY ANDRIANI

Prubowo Subianto dan Soediro telah mengajukan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Soediro kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bertarung kembali pada Pilpres 2019.

Prubowo Subianto dan Soediro telah mengajukan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Soediro kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bertarung kembali pada Pilpres 2019.

**DRAMA KUBU JOKO WIDODO**

1. Jokowi dan Mahfud MD...  
2. Jokowi dan Mahfud MD...  
3. Jokowi dan Mahfud MD...  
4. Jokowi dan Mahfud MD...  
5. Jokowi dan Mahfud MD...

**DRAMA KUBU PRABOWO SUBIANTO**

1. Prabowo Subianto dan Soediro...  
2. Prabowo Subianto dan Soediro...  
3. Prabowo Subianto dan Soediro...  
4. Prabowo Subianto dan Soediro...  
5. Prabowo Subianto dan Soediro...

# Mahfud MD Tidak Kecewa, Hanya Kaget

Mahfud MD tidak kecewa karena tidak terpilih sebagai calon Wakil Presiden 2019. Ia hanya merasa kaget karena sebelumnya ia yakin akan terpilih.

**Mr PECUT**

Pemilihan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Soediro...

# Dari Ruko, Minimarket, sampai Gedung Pascasarjana

Turut jadi Korban Gempa Susulan

# Jawa Pos

SELALU ADA YANG BARU

INDONESIA U-16 vs THAILAND U-16  
**BERTEMPURLAH SEPERTI PAHLAWAN**

SIKARNO - Jember Mahasiswa Jember...  
Sikarno, Ketua Mahasiswa Jember, mengatakan bahwa para atlet yang akan berangkat ke Thailand untuk mengikuti pertandingan sepak bola U-16 pada hari Sabtu (18/11/2017) di Bangkok adalah para atlet yang terbaik.

**Head-to-Head Prabowo-Jokowi 2014**

Keputusan	Prabowo	Jokowi	Perbedaan
1. Suara	1.232.367 (14,7%)	5.827.107 (69,7%)	4.594.740
2. Suara sah	1.232.367 (14,7%)	5.827.107 (69,7%)	4.594.740
3. Suara tidak sah	58.747 (0,7%)	130.000 (1,5%)	71.253
4. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
5. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
6. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
7. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
8. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
9. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
10. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
11. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
12. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
13. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
14. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
15. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
16. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
17. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
18. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
19. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
20. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
21. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
22. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
23. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
24. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
25. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
26. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
27. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
28. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
29. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
30. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
31. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
32. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
33. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
34. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
35. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
36. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
37. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
38. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
39. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
40. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
41. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
42. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
43. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
44. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
45. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
46. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
47. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
48. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
49. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
50. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
51. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
52. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
53. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
54. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
55. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
56. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
57. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
58. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
59. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
60. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
61. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
62. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
63. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
64. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
65. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
66. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
67. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
68. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
69. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
70. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
71. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
72. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
73. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
74. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
75. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
76. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
77. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
78. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
79. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
80. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
81. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
82. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
83. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
84. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
85. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
86. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
87. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
88. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
89. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
90. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
91. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
92. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
93. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
94. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
95. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
96. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
97. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
98. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
99. Suara tidak terdistribusi	0	0	0
100. Suara tidak terdistribusi	0	0	0

**Jargon Persatuan vs Kesejahteraan**

Jokowi dan Prabowo...  
Beberapa visi saat mendefinisikan Tes Kesehatan Dimulai Besok di RSPAD

**Mr PECUT**

Proses di pengadilan...  
jokowi anggap persatuan...  
Prabowo berkeinginan...

**NYATA ADANYA**

Kenapa berkeinginan...  
jokowi anggap persatuan...  
Prabowo berkeinginan...

**Konstruksi Harus Tahan Gempa**

Pemerintah Tetapkan 3 Kategori Bantuan Rehabilitasi Rumah

IAKARIDA, Peneliti...  
Pemerintah menetapkan...  
tiga kategori bantuan...  
rehabilitasi rumah...  
untuk korban gempa...  
di Toraja, Sulawesi Selatan...  
pada Rabu (15/11/2017).

**Voters Muda, Jangan Baperan**

STEFAN DIAS SATRIA

Salah satu alasan mengapa...  
Pemilihan presiden dan...  
cawapres 2019 akan...  
dipengaruhi oleh...  
pemilihan presiden dan...  
cawapres 2019 akan...  
dipengaruhi oleh...

# Jargon Persatuan vs Kesejahteraan

Sejarah baru terdapat dalam jargon persatuan dan kesejahteraan. Keduanya memiliki makna yang berbeda-beda. Jargon persatuan adalah jargon yang digunakan oleh pemerintah untuk menenangkan masyarakat. Sementara itu, kesejahteraan adalah jargon yang digunakan oleh masyarakat untuk menuntut perubahan.

Sejarah baru terdapat dalam jargon persatuan dan kesejahteraan. Keduanya memiliki makna yang berbeda-beda. Jargon persatuan adalah jargon yang digunakan oleh pemerintah untuk menenangkan masyarakat. Sementara itu, kesejahteraan adalah jargon yang digunakan oleh masyarakat untuk menuntut perubahan.

Sejarah baru terdapat dalam jargon persatuan dan kesejahteraan. Keduanya memiliki makna yang berbeda-beda. Jargon persatuan adalah jargon yang digunakan oleh pemerintah untuk menenangkan masyarakat. Sementara itu, kesejahteraan adalah jargon yang digunakan oleh masyarakat untuk menuntut perubahan.

Sejarah baru terdapat dalam jargon persatuan dan kesejahteraan. Keduanya memiliki makna yang berbeda-beda. Jargon persatuan adalah jargon yang digunakan oleh pemerintah untuk menenangkan masyarakat. Sementara itu, kesejahteraan adalah jargon yang digunakan oleh masyarakat untuk menuntut perubahan.

## Voters Muda, Jangan Baperan

Sejarah baru terdapat dalam jargon persatuan dan kesejahteraan. Keduanya memiliki makna yang berbeda-beda. Jargon persatuan adalah jargon yang digunakan oleh pemerintah untuk menenangkan masyarakat. Sementara itu, kesejahteraan adalah jargon yang digunakan oleh masyarakat untuk menuntut perubahan.

Sejarah baru terdapat dalam jargon persatuan dan kesejahteraan. Keduanya memiliki makna yang berbeda-beda. Jargon persatuan adalah jargon yang digunakan oleh pemerintah untuk menenangkan masyarakat. Sementara itu, kesejahteraan adalah jargon yang digunakan oleh masyarakat untuk menuntut perubahan.

## Gagal Cawapres, AHY Minta Mac

Sejarah baru terdapat dalam jargon persatuan dan kesejahteraan. Keduanya memiliki makna yang berbeda-beda. Jargon persatuan adalah jargon yang digunakan oleh pemerintah untuk menenangkan masyarakat. Sementara itu, kesejahteraan adalah jargon yang digunakan oleh masyarakat untuk menuntut perubahan.

Sejarah baru terdapat dalam jargon persatuan dan kesejahteraan. Keduanya memiliki makna yang berbeda-beda. Jargon persatuan adalah jargon yang digunakan oleh pemerintah untuk menenangkan masyarakat. Sementara itu, kesejahteraan adalah jargon yang digunakan oleh masyarakat untuk menuntut perubahan.

## Saya Bingung Kenapa Hanya Sumur Saya Yang Muncrat

Sejarah baru terdapat dalam jargon persatuan dan kesejahteraan. Keduanya memiliki makna yang berbeda-beda. Jargon persatuan adalah jargon yang digunakan oleh pemerintah untuk menenangkan masyarakat. Sementara itu, kesejahteraan adalah jargon yang digunakan oleh masyarakat untuk menuntut perubahan.

Sejarah baru terdapat dalam jargon persatuan dan kesejahteraan. Keduanya memiliki makna yang berbeda-beda. Jargon persatuan adalah jargon yang digunakan oleh pemerintah untuk menenangkan masyarakat. Sementara itu, kesejahteraan adalah jargon yang digunakan oleh masyarakat untuk menuntut perubahan.

## Bertempur seperti Pahlawan

Sejarah baru terdapat dalam jargon persatuan dan kesejahteraan. Keduanya memiliki makna yang berbeda-beda. Jargon persatuan adalah jargon yang digunakan oleh pemerintah untuk menenangkan masyarakat. Sementara itu, kesejahteraan adalah jargon yang digunakan oleh masyarakat untuk menuntut perubahan.

Sejarah baru terdapat dalam jargon persatuan dan kesejahteraan. Keduanya memiliki makna yang berbeda-beda. Jargon persatuan adalah jargon yang digunakan oleh pemerintah untuk menenangkan masyarakat. Sementara itu, kesejahteraan adalah jargon yang digunakan oleh masyarakat untuk menuntut perubahan.

## Konstruksi Harus Tahan Gempa

Sejarah baru terdapat dalam jargon persatuan dan kesejahteraan. Keduanya memiliki makna yang berbeda-beda. Jargon persatuan adalah jargon yang digunakan oleh pemerintah untuk menenangkan masyarakat. Sementara itu, kesejahteraan adalah jargon yang digunakan oleh masyarakat untuk menuntut perubahan.

Sejarah baru terdapat dalam jargon persatuan dan kesejahteraan. Keduanya memiliki makna yang berbeda-beda. Jargon persatuan adalah jargon yang digunakan oleh pemerintah untuk menenangkan masyarakat. Sementara itu, kesejahteraan adalah jargon yang digunakan oleh masyarakat untuk menuntut perubahan.

**Jawa Pos**  
0-4  
TAK BERI AMPUN LAWAN  
SURABAYA MARATHON  
Bentuk Tim Lawan Hoax Medsos  
Calon Tak Harus Bersi dan Penyakit  
Bus Salawat Antar Jamaah ke Masjidilharam



### Jangan Gadaikan Persatuan

**S**alah satu tahapan dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 adalah ramping. Semua partai sudah mengisi slot koalisi masing-masing, menghasilkan dua pasangan calon. Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Samudra Salimuddin Uno. Drama nego-nego politik nasional yang penuh kejutan terkait pilpres sudah usai.

Partai Demokrat yang sempat "menjonblo" akhirnya memilih bergabung dengan koalisi kabu Prabowo di detik-detik akhir. Meski sempat terjadi kontroversi cuitan Wakil spin Andi Arief yang cukup keras di Twitter terkait Prabowo, toh Agus Harimurti Yudhoyono bekas petinggi Demokrat terlihat hadir dalam pendaftaran Prabowo. Pilihan yang dapat dimaklumi. Sebab itu satu-satunya opsi teresita mendapat sanksi tidak bisa mengukuti pesta demokrasi lima tahun berikutnya (Pemilu 2024).

Tentu saja koalisisi dua pasangan calon yang ada tak bisa memuaskan banyak pihak. Bahkan boleh dibalang, pendukung kedua kabu pun resentent dengan pilihan yang ada. Yang dirasa cukup gopul. Tapi, begitulah demokrasi. Tentu tak akan bisa memuaskan semua pihak.

Apa pun, proses pencarian calon sudah dilakukan. Selama sepuluh bulan ke depan, pasangan calon tersebut berhadapan untuk mengali dukungan masyarakat. Mereka akan menajalkan program unggulan masing-masing. Mana yang dianggap rakyat lebih baik, itulah yang dipilih.

Berkecapan pada pilpres empat tahun lalu dan pilgub DKI Jakarta tahun lalu, sudah seharusnya ada perbaikan sistem yang lebih bisa menjamin kedua kabu tidak menggunakan cara-cara provokatif. Misalnya, mungkin perlu ada pakta integritas, atau apa pun, yang menjamin kesediaan para kandidat kabu berperan aktif untuk mendinginkan situasi jika terjadi eskalasi konflik baik di masyarakat maupun di media sosial.

Seperti halnya komitmen terhadap politik uang (*money politics*), kedua kabu juga diminta tanda tangan yang bersi jaminan tidak membuat kecuratan hal-hal yang bisa memisahkan suksesnya. Apa pun, para calon harus satu tim suksesnya punya tanggung jawab moral untuk tidak membuat rakyat semakin terbelah. Bersaman halnya ini adalah hal yang harus dijaga kuat oleh kedua pasangan calon dan pendukungnya.

Cukup sudah Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017 diwarnai kontestasi yang tak sehat. Pilpres tahun depan harus menjadi pilpres yang lebih baik. Adu gagasan, bukan adu macaman. Sebab, pada dasarnya, dua pasangan calon sebenarnya punya satu visi yang sama: menajatkan Indonesia. (C)

### Kultur politik di Indonesia memang belum matang se Amerika yang telah berusia ratusan tahun selai demokrasiya lebih matang. Sementara usia negara "baru" 73 tahun pada 17 Agustus 2018. Selama 73 t langgan demokrasi negara kita berubah-

**PASCA** kemerdekaan, pada masa pemerintahan Orde Lama (1945-1965), demokrasi terlipih menjadi langgan dinamika politik negara kita. Diawali demokrasi asas tunggal pada era rezim Orde Baru (1966-1998), kala Pancasila dieduksi sebagai dalih menjalakan totalitarisme politik.

Kemudian, Orde Baru lengser dan Orde Reformasi bangkit (1998). Demokrasi liberal hadir bertierap-degap dengan diantar era multi-partai. Demokrasi yang jauh baugun itu tentu memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan kultur politik.

Kultur politik yang dimaksud adalah kehidupan politik kekuasaan yang berbasis nilai-nilai, gagasan, perilaku/ekspresi, dan produk-produk politik yang memberi makna penting bagi perjalanan bangsa dalam membangun peradaban.

Dalam konteks kultur politik yang belum matang, para aktor politik, baik penyenggara negara maupun masyarakat, cenderung menggunakan cara-cara instan: sedikit kerja, sedikit biaya, tapi banyak hasratnya.

Salah satunya adalah mengisu SARA (etnik, agama, ras, dan golongan) demi mendid dukungan publik yang gampang diprovokasi.

Pada masa Orde Lama, is meling telah muncul, is telah menanjol. Meskipun partai politik yang pada saat itu rak aliran (Islam, nasionalis, munisane) yang sesungguhnya potensi monial isu SARA, partai politik menajal is SARA merupak produk Baru. Ia jadi idiom atau term politik yang diberigat pasayurid.

Hal itu tidak terlepas dari Soeharto yang didukung ABC (Golok dan birokrasi), menajal is SARA sebagai syarat pembangunan ekonomi. I melihat, persoalan SARA

### Aktivis M

**PADA** abad ke-21 ini, semua orang akan dipaksa untuk terus berkarya dan bersaing dalam bidang apa pun. Sebab, karya teknologi terus berubah dan berkembang. Mutuul pola pekerjaan yang mungkin dianggap tidak perlu karena sudah digantikan teknologi yang canggih. Hal tersebut akan melibas manusia yang tidak siap menghadapi itu semua.

Bernie Trilling & Charles Fadel dalam bukunya *21 Century Skills*, mengatakan bahwa akan sangat dibutuhkan beberapa keterampilan untuk siap menghadapi abad ke-

Parahlah, di luar itu semua baik pun belum tentu bisa me problematika zaman saat ini kondisi inilah, para aktivis menajal isasi positif. Terutama mereka yang berbasis mengat rapa organisasi di tengah kemaynerapan magka.

Meskipun nilai PKK mer sebagai mahasiswa yang la positifnya adalah merakit menyelesaikan masalah dalam organisasi.

Mahasiswa aktif menajal is diartipada mahasiswa yang

### 3. Surat Kabar Harian Kompas

**KOMPAS**  
AMANAT HATI-NURANI RAKYAT

**JUMAT, 10 AGUSTUS 2018**

## Dinamika Terakhir Menjadi Penentu

Kontestasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2019 kembali terulang di tengah 2018. Protes dan pengaitan calon untuk dua kandidat ini berlanjutan di saat-saat akhir.

**Balai Dasawana** **Centang** **Di** **2018**

60.4	61.25
28.7	26.19
10.9	10.2

**INDUKSI HEBEL**  
**Redupnya Pusat Ukir Dunia di Jepara**

**PERFORMAN EKONOMI**  
**Tantangan Semakin Kompleks**

## Pemilu Presiden Elitis

**P**olitik adalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana cara mendapatkannya. Itulah teori politik ilmuwan Amerika Serikat, Harold Laswell (1902-1978).

Teori politik itu rasanya relevan melihat manuver politik elite politis satu-dua hari menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Posisi calon wapres menjadi karni yang diperburuk. Bahkan, beberapa partai politik mengesalkan, calon wapres usulan partainya adalah "harga mati". Namun, realitas politik menunjukkan tidak ada "harga mati" dalam politik karena politik dipahami sebagai negosiasi dan transaksi yang dikemas dalam bahasa politik canggih *power sharing*.

Dalam bahasa sehari-hari, *power sharing* diartikan sebagai pembagian kursi kabinet. Portofolio kabinet bisa saja menjadi ruang yang dinegosiasikan untuk memberikan dukungan kepada calon presiden tertentu. *Power sharing* kadang dirumuskan dengan frasa bahwa masalah bangsa begitu banyak sehingga tak bisa diselesaikan oleh satu kelompok. *Power sharing* diharuskan karena aturan konstitusi mengatur soal ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara nasional. Karena tidak ada satu partai politik pun yang bisa memenuhi ambang batas, koalisi partai politik pun menjadi keniscayaan.

*Power sharing* sah-sah saja dalam upaya menjalankan pemerintahan. Koalisi dan *power sharing* seharusnya didasarkan pada kesamaan platform, kesamaan visi dan misi, serta kesamaan nilai-nilai hakiki yang akan dibangun, bukan semata-mata untuk meraih kemenangan elektoral. Kesamaan tujuan untuk memajukan rakyat sebagai subjek yang harus diperhatikan, menjadikan tujuan yang harus dicapai bersama.

Penentuan capres dan cawapres dalam Pemilu 2019 menjadi karni rumit karena semua partai politik menempatkan faktor Pemilu 2024 sebagai faktor yang dikalkulasikan. Siapa pun yang akan menjabat wapres dianggap mempunyai pengaruh besar untuk memenangkan Pemilu 2024. Ego partai politik lebih mengemuka. Sebuah ruang kalkulasi politik yang terjebak jauh.

Namun, melihat dinamika politik yang terjadi, politik ideal yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama tetap jauh dari harapan. Bangunan koalisi baru pada sampai apa yang dikatakan oleh Laswell. "Kami mendapat apa, kapan dan bagaimana." Dalam ruang politik elitis, itulah yang mengemuka, posisi rakyat bisa kian termarginalkan.

Bangun koalisi seharusnya bukan hanya untuk memenangkan sebuah kontesasi dengan hitungan matematika politik, melainkan bagaimana pemerintahan yang akan terbentuk bisa menjalankan pemerintahan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberikan rasa aman dan tetap menjaga kemajemukan bangsa di bawah Pancasila.

Realitas politik kontemporer paling tidak menunjukkan Indonesia masih lebih banyak dikuasai politisi, tetapi miskin negarawan. Mengetap intelektual Amerika Serikat, James Clarke, "Seorang politisi berpikir tentang pemilihan ketika seorang negarawan berpikir tentang generasi masa depan."

## KEMISKIN

Hasil riset mutakhir Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), The Bootstrap Index (3/8), menyebut waktu yang dibutuhkan 10 persen penduduk paling miskin di sejumlah negara untuk meraih pendapatan rata-rata di negara masing-masing.

**D**anmark, Swedia, Australia, dan Jepang hanya perlu waktu 2-4 generasi. Inggris, Italia, dan Amerika Serikat 5 generasi, China dan India 7 generasi, sementara Brasil dan Afrika Selatan 9 generasi. Jangka waktu lama dan kesulitan mobilitas ke atas kumulatif merupakan pembelajaran mahal dan butuh kajian saksama, terkait sistem politik dan ekonomi sebuah negara.

Dari data BIS yang menampilkan disparitas tinggi kemiskinan desa-kota (13,20 berbanding 7,02 persen per Maret 2018), kita dapat menjejak akar persoalan dan upaya yang telah ditempuh untuk mengatasinya. Ada lima sumber utama kemiskinan dan ketimpangan dengan derajat pengaruh bervariasi. Pertama, sebab internal yang mencakup individual-komunal-lingkungan. Ketimpangan akibat kemiskinan struktural berupa menipisnya pola kehidupan subsisten, keterisolasian, dan ketertinggalan dari luar masih cukup banyak kendati proporsinya secara nasional semakin berkurang.

Ratusan bahkan ribuan pulau di Provinsi Kepulauan Riau, Bangka-Belitung, Sulawesi Utara dan Tenggara, NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, serta beberapa provinsi lain yang angka kemiskinannya tinggi membutuhkan afirmasi kebijakan, agar tak terus dirundung masalah daya beli dan kesulitan mengakses kebutuhan dasar.

Bank Dunia akhir 2017 merileh sekitar 85 persen penduduk Indonesia digolongkan

persen kin, sep mun, p babat belum penang HPS m misaki 2018 r tasi b segara digit 9 tara 2 dduok Bank elis p mener 52 jut nyum total bangs patit tetapi kan 4 stau dta 3 meng lang dup Pen K stru keb rah ngi dat da ra ga de w e n p p e r s ti di da

# KOMPAS

AMANAHATI KUHANI RAKYAT

**Pewarta Foto**  
Keribut di arena bertubi-tubi hingga ke arena pertandingan.

**Diplomasi Nikita**  
Apa yang terjadi di era masa diplomasi Nikita Khrushchev dengan John F. Kennedy?

**China di Bromo**  
China kembali datang, dan akan datang ke Bromo. Bagaimana?

## Semua Kandidat Dorong Pemilu Damai

Pesangan Joko Widodo-KI Ma'ruf Amin serta Prabowo-Suharno-Sandaga Uno mendorong Pemilu 2019 berlangsung damai. Pada saat yang sama, pesatuan ekonomi nasional, lapangan yang serbas...

**Sepanjang Tantangan Ekonomi Indonesia**

Tahun	0.39%	0.39%	5.94%	5.50%
2014				
2015				
2016				
2017				
2018				

**Kontribusi terhadap GDP**

Tahun	13.79%	13.68%
2014		
2015		
2016		
2017		
2018		

**Kontribusi terhadap GDP**

Tahun	5.01%	5.07%
2014		
2015		
2016		
2017		
2018		

**Wajib bayar target**

Tahun	123,81	177,12
2014		
2015		
2016		
2017		
2018		

**Wajib bayar target**

Tahun	163,50	172,34
2014		
2015		
2016		
2017		
2018		

**Perdagangan Luar Negeri**

Tahun	175,08	168,73
2014		
2015		
2016		
2017		
2018		

**INDEX**

**CEMPA LORDE**

**Masa Tanggap Darurat Diperpanjang**

**KESEKSTARAN LINDURKAN**

**Mempertahankan "Bu" Terakhir**

KOMPAS, SABTU, 11 AGUSTUS 2011

**KOLAM politik**

### Politik Tikungan Terakhir

M. Subhan SD

Pada 11 Agustus 2011, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) akan menggelar pemilihan umum legislatif (PILU) tingkat kabupaten/kota. Pemilihan ini merupakan babak terakhir dari proses pemilihan umum nasional yang akan berlangsung pada 15 Agustus 2011.

PDI Perjuangan sebagai partai politik terbesar di Indonesia, tentu saja memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pemilihan ini. Namun, tantangan yang dihadapi partai ini bukanlah hanya sekedar memenangkan suara, melainkan bagaimana memastikan bahwa suara tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa partai politik yang memenangkan suara dapat menjalankan amanah rakyat dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen partai, mulai dari pengurus partai hingga kader partai di tingkat akar rumput.

Di sisi lain, persaingan yang ketat dari partai politik lain juga menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, PDI Perjuangan perlu melakukan strategi yang tepat untuk memenangkan suara rakyat. Strategi ini harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta kemampuan untuk menawarkan alternatif kebijakan yang lebih baik.

Keberhasilan PDI Perjuangan dalam memenangkan suara rakyat pada 11 Agustus 2011 akan sangat bergantung pada seberapa baik partai ini dapat menjalankan strategi politik yang telah dirancang. Oleh karena itu, seluruh elemen partai perlu bersinergi dan bekerja sama untuk memastikan bahwa partai ini dapat memenangkan suara rakyat dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

Politik & Hukum | 3

### Strategi Para Pemburu Efek Ekor Jas

M... (text partially obscured)



Para pemburu efek ekor jas... (text partially obscured)

KOMPAS MINGGU, 13 AGUSTUS 2011

2 **Politik & Hukum**

### Menakar Dampak "Ekor Jas" Pemilu

Konflik calon pesisir dan kota waktu kejadian dalam Pilpres 2009 sangat penting bagi partai politik. Pengepungan kawasan pesisir dan kota waktu kejadian dalam Pilpres 2009 sangat penting bagi partai politik.



... (text partially obscured)